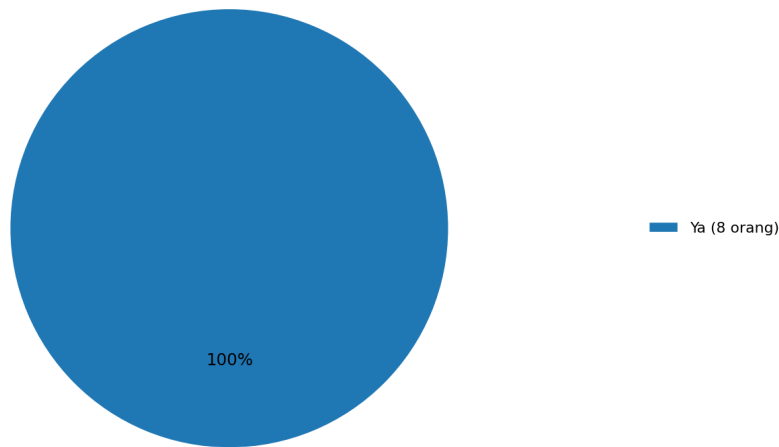


III. Survey Tenaga Kependidikan

1. Pengetahuan Tenaga Kependidikan terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pengetahuan Tenaga Kependidikan terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



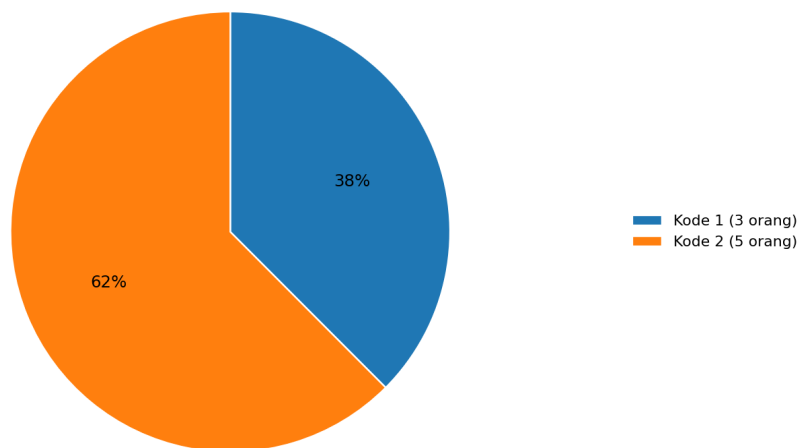
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 100% atau 8 orang menjawab Ya pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan jawaban yang sama pada indikator ini, sehingga aspek yang ditanyakan telah diketahui oleh seluruh responden dalam data survey yang dianalisis.

Pengetahuan tenaga kependidikan terhadap visi dan misi Fakultas perlu dipertahankan melalui sosialisasi berkala, briefing unit, dan pengaitan visi-misi dengan pelaksanaan layanan administrasi pada masing-masing unit kerja.

2. Pemahaman terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pemahaman terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



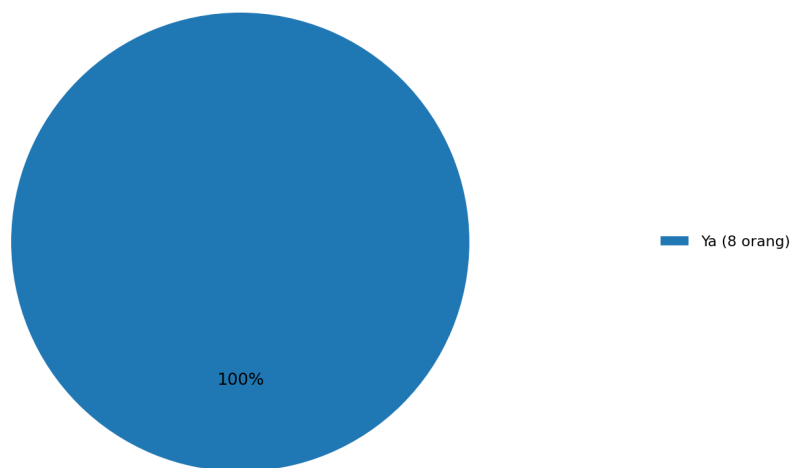
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden belum terkonsentrasi kuat pada kode 1. Oleh karena itu, indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

Strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sosialisasi visi dan misi melalui kegiatan akademik, layanan unit, media informasi resmi, serta briefing berkala agar visi dan misi tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dalam pelaksanaan tugas dan layanan sehari-hari.

3. Pengetahuan Tenaga Kependidikan terhadap SOP pada Unit Kerja

Pengetahuan Tenaga Kependidikan terhadap SOP pada Unit Kerja



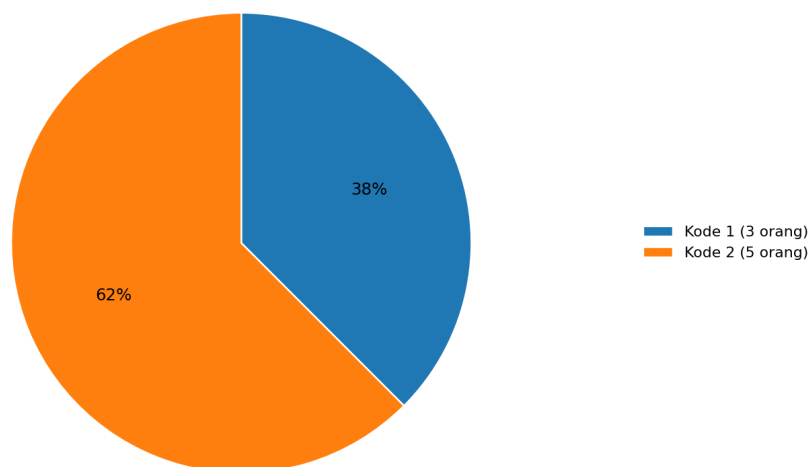
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 100% atau 8 orang menjawab Ya pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan jawaban yang sama pada indikator ini, sehingga aspek yang ditanyakan telah diketahui oleh seluruh responden dalam data survey yang dianalisis.

Pengetahuan terhadap SOP perlu dilanjutkan dengan penguatan pemahaman operasional, antara lain melalui review SOP, simulasi alur layanan, dan evaluasi berkala atas pelaksanaan prosedur pada unit kerja.

4. Pemahaman terhadap SOP pada Unit Kerja

Pemahaman terhadap SOP pada Unit Kerja



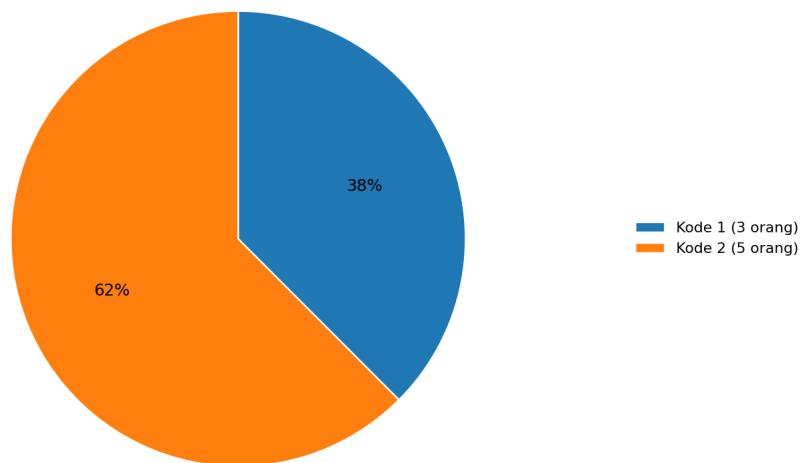
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden belum terkonsentrasi kuat pada kode 1. Oleh karena itu, indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

Perlu dilakukan penguatan pemahaman SOP melalui review berkala, penyederhanaan alur layanan, simulasi prosedur, serta penyediaan ringkasan SOP yang mudah diakses pada masing-masing unit kerja.

5. Pemahaman terhadap Visi dan Misi Program Studi Tempat Bertugas

Pemahaman terhadap Visi dan Misi Program Studi Tempat Bertugas



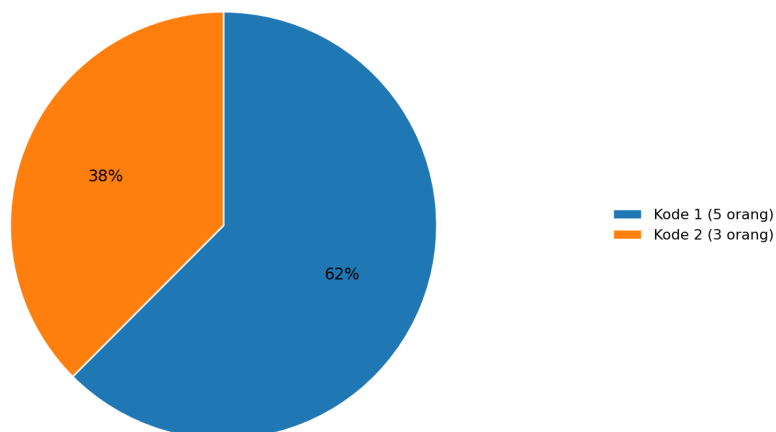
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden belum terkonsentrasi kuat pada kode 1. Oleh karena itu, indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

Strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sosialisasi visi dan misi melalui kegiatan akademik, layanan unit, media informasi resmi, serta briefing berkala agar visi dan misi tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dalam pelaksanaan tugas dan layanan sehari-hari.

6. Kualitas Interaksi dan Koordinasi Antar Rekan Kerja dalam Mendukung Layanan Prodi

Kualitas Interaksi dan Koordinasi Antar Rekan Kerja dalam Mendukung Layanan Prodi



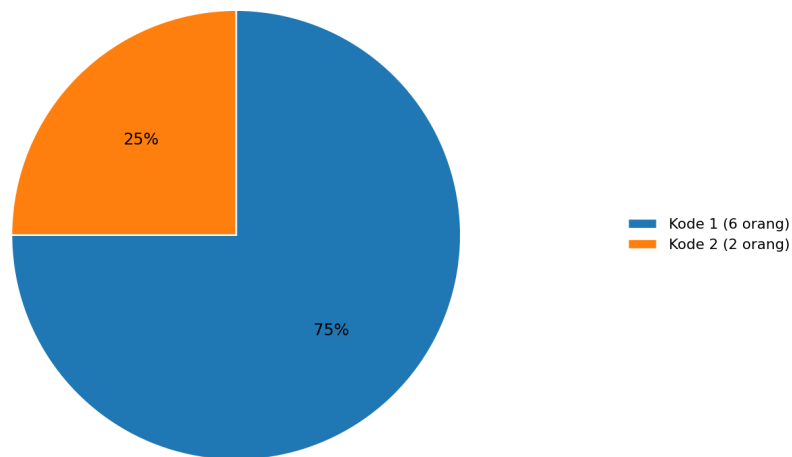
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden masih didominasi oleh kode 1, namun distribusi pada kode 2 dan/atau kode 3 perlu diperhatikan sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Perlu dilakukan penguatan koordinasi, komunikasi dua arah, dan pembagian peran yang jelas agar pelaksanaan layanan maupun kerja tim dapat berjalan lebih efektif.

7. Dukungan Unit Kerja untuk Melanjutkan Studi ke Jenjang Lebih Tinggi

Dukungan Unit Kerja untuk Melanjutkan Studi ke Jenjang Lebih Tinggi



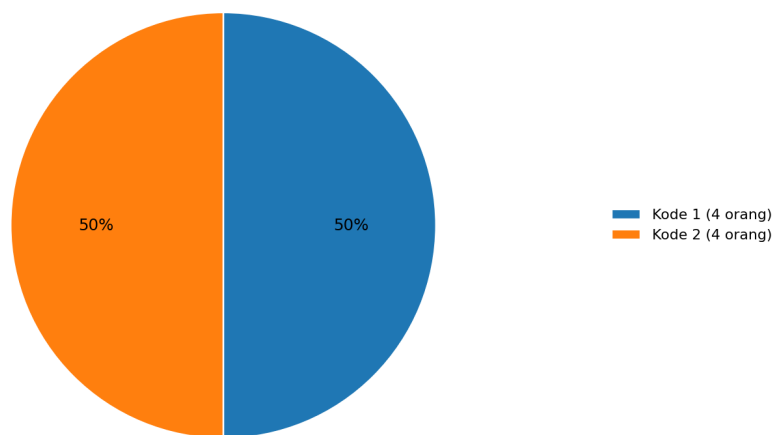
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 75% atau 6 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 25% atau 2 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian kode 1. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang memberikan kode lain, sehingga indikator tersebut tetap perlu dipantau agar kualitas pelaksanaannya lebih merata.

Strategi tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi lebih lanjut atas aspek yang masih belum merata, memperjelas mekanisme pelaksanaan, dan mendokumentasikan tindak lanjut tersebut dalam siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

8. Ketersediaan Akses Informasi Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa Studi Lanjut

Ketersediaan Akses Informasi Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa Studi Lanjut



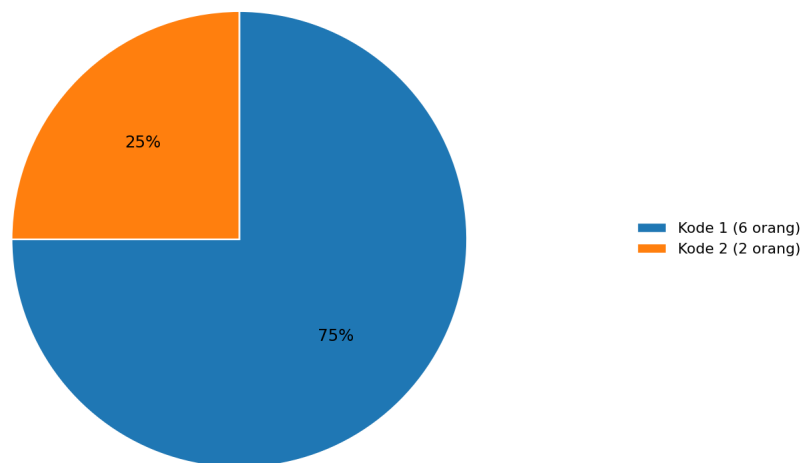
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 50% atau 4 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 50% atau 4 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden belum terkonsentrasi kuat pada kode 1. Oleh karena itu, indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

Perlu diperkuat kanal informasi resmi yang mudah diakses, konsisten, dan diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna layanan menjadi lebih seragam dan tidak bergantung pada komunikasi informal.

9. Dukungan Unit Kerja untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Diri

Dukungan Unit Kerja untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Diri



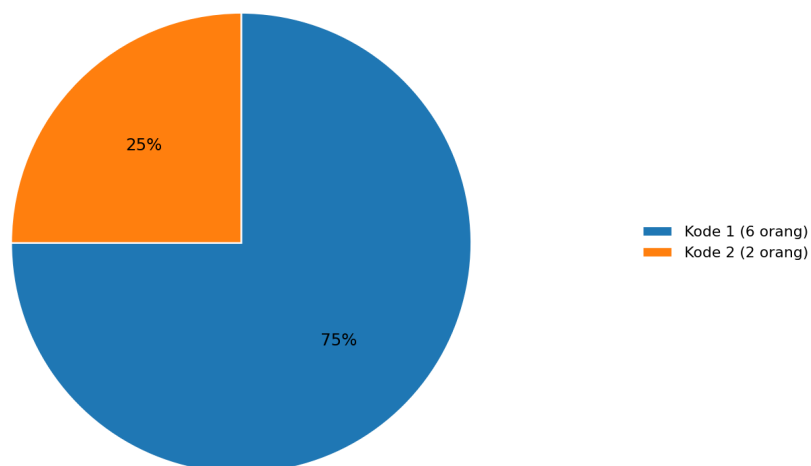
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 75% atau 6 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 25% atau 2 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian kode 1. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang memberikan kode lain, sehingga indikator tersebut tetap perlu dipantau agar kualitas pelaksanaannya lebih merata.

Strategi yang dapat dilakukan adalah memperjelas informasi peluang pengembangan diri, studi lanjut, pelatihan, jenjang karier, dan pendampingan administrasi agar akses pengembangan kapasitas dapat dirasakan secara lebih merata.

10. Informasi tentang Rekrutmen Tenaga Kependidikan

Informasi tentang Rekrutmen Tenaga Kependidikan



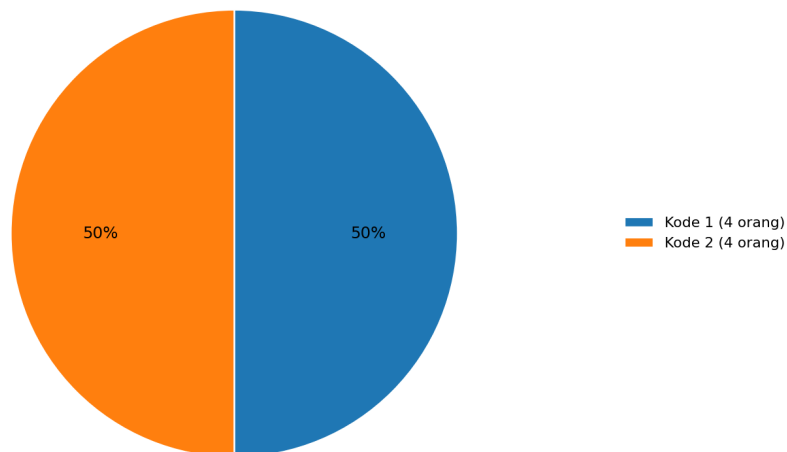
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 75% atau 6 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 25% atau 2 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian kode 1. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang memberikan kode lain, sehingga indikator tersebut tetap perlu dipantau agar kualitas pelaksanaannya lebih merata.

Perlu diperkuat kanal informasi resmi yang mudah diakses, konsisten, dan diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna layanan menjadi lebih seragam dan tidak bergantung pada komunikasi informal.

11. Kesesuaian Proses Rekrutmen dengan Prosedur yang Adil dan Objektif

Kesesuaian Proses Rekrutmen dengan Prosedur yang Adil dan Objektif



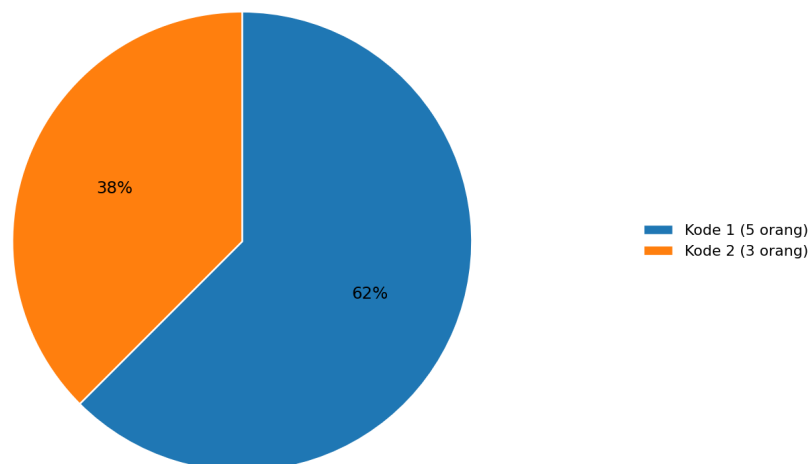
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 50% atau 4 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 50% atau 4 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden belum terkonsentrasi kuat pada kode 1. Oleh karena itu, indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

Perlu diperkuat transparansi informasi, kriteria, tahapan, dan dokumentasi proses rekrutmen atau seleksi internal agar pelaksanaannya dipahami sebagai proses yang adil, objektif, dan akuntabel.

12. Keterbukaan Informasi Seleksi Internal bagi Tenaga Kependidikan

Keterbukaan Informasi Seleksi Internal bagi Tenaga Kependidikan



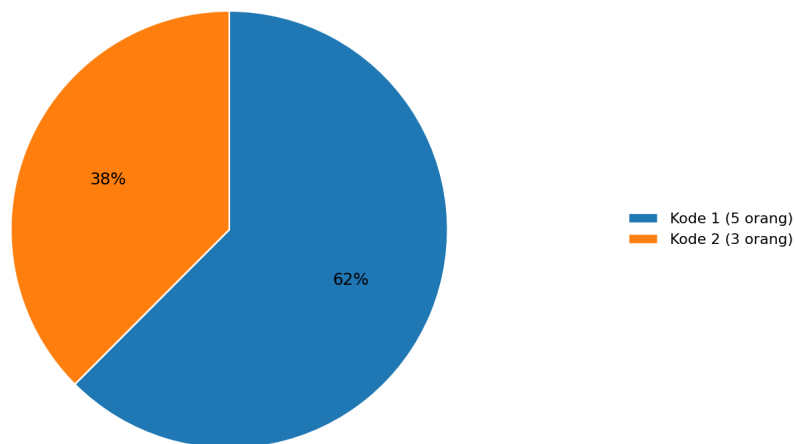
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden masih didominasi oleh kode 1, namun distribusi pada kode 2 dan/atau kode 3 perlu diperhatikan sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Perlu diperkuat kanal informasi resmi yang mudah diakses, konsisten, dan diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna layanan menjadi lebih seragam dan tidak bergantung pada komunikasi informal.

13. Kesesuaian Seleksi Internal dengan Prosedur yang Transparan dan Objektif

Kesesuaian Seleksi Internal dengan Prosedur yang Transparan dan Objektif



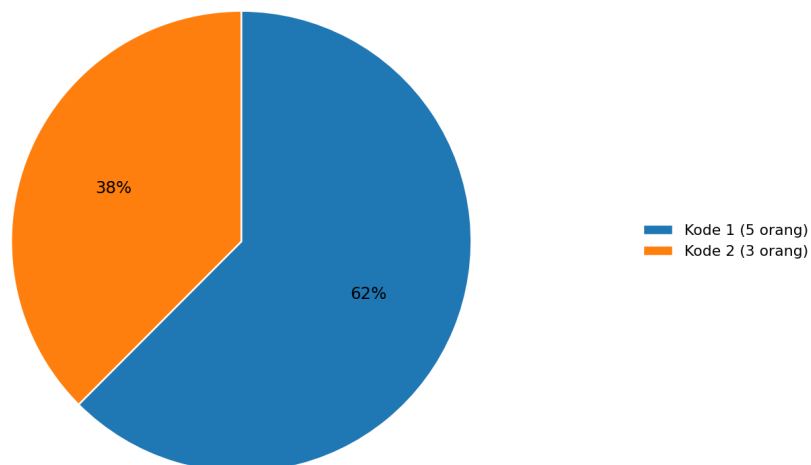
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden masih didominasi oleh kode 1, namun distribusi pada kode 2 dan/atau kode 3 perlu diperhatikan sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Perlu diperkuat transparansi informasi, kriteria, tahapan, dan dokumentasi proses rekrutmen atau seleksi internal agar pelaksanaannya dipahami sebagai proses yang adil, objektif, dan akuntabel.

14. Akses Informasi mengenai Jenjang Karier dan Kepangkatan

Akses Informasi mengenai Jenjang Karier dan Kepangkatan



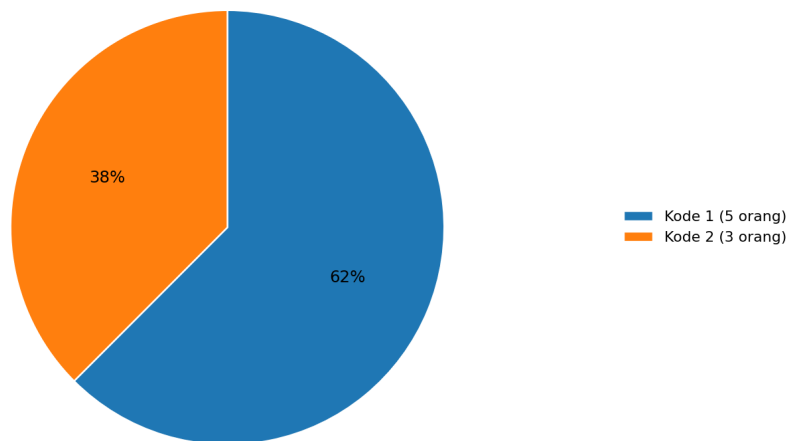
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden masih didominasi oleh kode 1, namun distribusi pada kode 2 dan/atau kode 3 perlu diperhatikan sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Perlu diperkuat kanal informasi resmi yang mudah diakses, konsisten, dan diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna layanan menjadi lebih seragam dan tidak bergantung pada komunikasi informal.

15. Dukungan Unit Kerja dalam Pendampingan Proses Kenaikan Jenjang Karier

Dukungan Unit Kerja dalam Pendampingan Proses Kenaikan Jenjang Karier



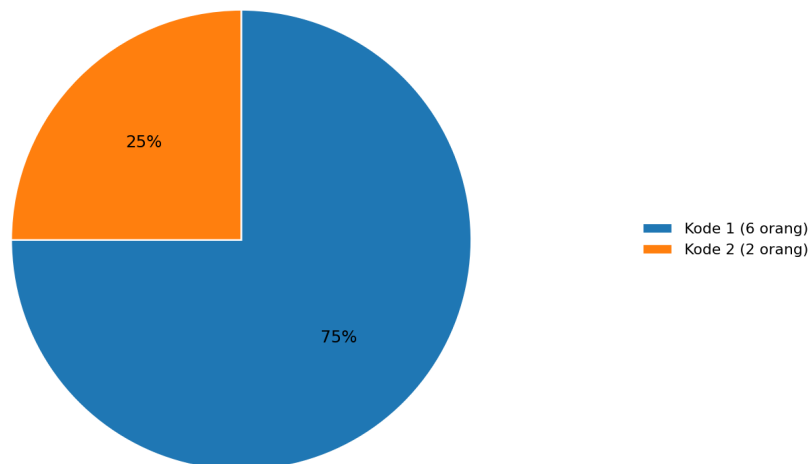
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden masih didominasi oleh kode 1, namun distribusi pada kode 2 dan/atau kode 3 perlu diperhatikan sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Strategi yang dapat dilakukan adalah memperjelas informasi peluang pengembangan diri, studi lanjut, pelatihan, jenjang karier, dan pendampingan administrasi agar akses pengembangan kapasitas dapat dirasakan secara lebih merata.

16. Kepuasan terhadap Layanan Jaminan Kesehatan

Kepuasan terhadap Layanan Jaminan Kesehatan



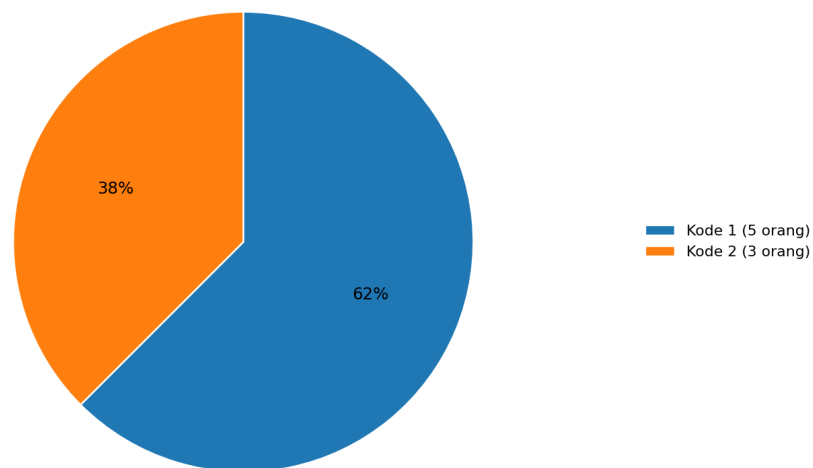
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 75% atau 6 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 25% atau 2 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian kode 1. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang memberikan kode lain, sehingga indikator tersebut tetap perlu dipantau agar kualitas pelaksanaannya lebih merata.

Perlu dilakukan pemeliharaan kualitas layanan jaminan kesehatan serta penyampaian informasi yang jelas mengenai hak, prosedur, dan kanal bantuan apabila tenaga kependidikan mengalami kendala layanan.

17. Penilaian terhadap Fasilitas Keselamatan Kerja

Penilaian terhadap Fasilitas Keselamatan Kerja



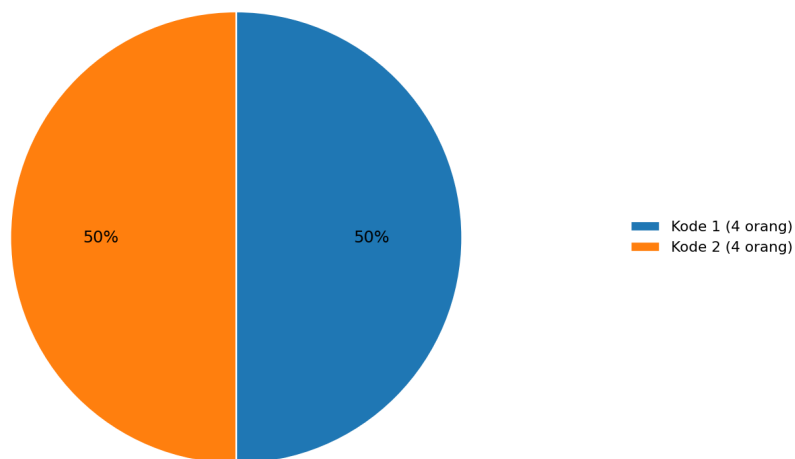
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden masih didominasi oleh kode 1, namun distribusi pada kode 2 dan/atau kode 3 perlu diperhatikan sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Strategi tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan, pemeriksaan berkala, pemeliharaan fasilitas, dan perbaikan sarana pendukung berdasarkan prioritas layanan yang paling dibutuhkan oleh pengguna.

18. Sosialisasi atau Simulasi Prosedur Keselamatan Kerja secara Berkala

Sosialisasi atau Simulasi Prosedur Keselamatan Kerja secara Berkala



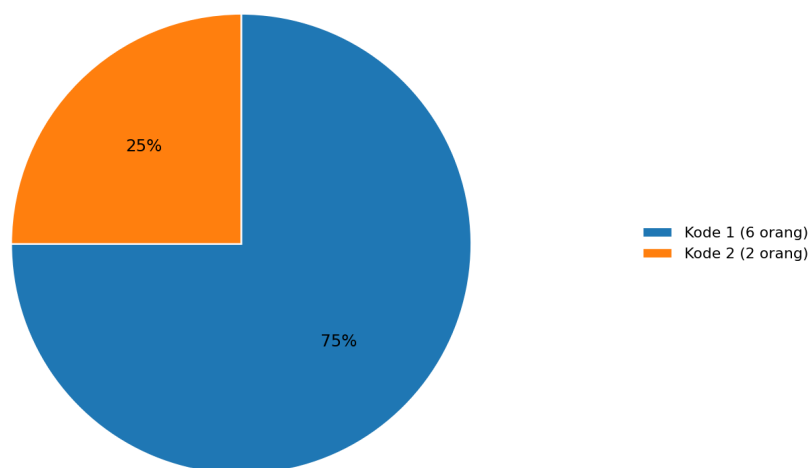
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 50% atau 4 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 50% atau 4 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden belum terkonsentrasi kuat pada kode 1. Oleh karena itu, indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

Strategi yang dapat dilakukan adalah meninjau ketersediaan fasilitas keselamatan kerja, memperkuat sosialisasi prosedur kedaruratan, serta melaksanakan simulasi keselamatan kerja secara berkala.

19. Kemudahan Prosedur Birokrasi Pengajuan Cuti

Kemudahan Prosedur Birokrasi Pengajuan Cuti



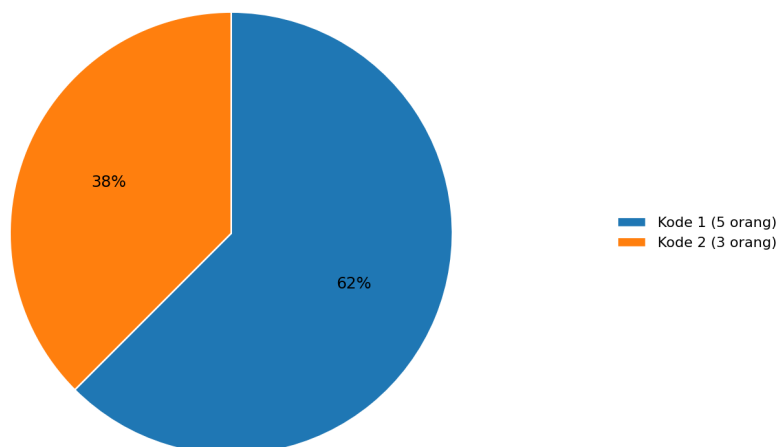
Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 75% atau 6 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 25% atau 2 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian kode 1. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang memberikan kode lain, sehingga indikator tersebut tetap perlu dipantau agar kualitas pelaksanaannya lebih merata.

Perlu dipertahankan kemudahan prosedur cuti melalui kejelasan informasi, penyederhanaan alur administrasi, dan konsistensi pelaksanaan ketentuan cuti pada unit kerja.

20. Kejelasan Informasi mengenai Ketentuan Cuti bagi Tenaga Kependidikan

Kejelasan Informasi mengenai Ketentuan Cuti bagi Tenaga Kependidikan



Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden adalah 8 orang. Diketahui bahwa sejumlah 62,5% atau 5 orang memberikan penilaian kode 1; sejumlah 37,5% atau 3 orang memberikan penilaian kode 2 pada indikator tersebut.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden masih didominasi oleh kode 1, namun distribusi pada kode 2 dan/atau kode 3 perlu diperhatikan sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut.

Perlu diperkuat kanal informasi resmi yang mudah diakses, konsisten, dan diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna layanan menjadi lebih beragam dan tidak bergantung pada komunikasi informal.

C. Penutup

Demikian analisis hasil survey mahasiswa, pengguna lulusan, dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hasil analisis dan rekomendasi tindak lanjut tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

dan evaluasi dalam mendukung peningkatan mutu layanan akademik, layanan non-akademik, pengembangan tenaga kependidikan, penguatan kompetensi lulusan, serta pelaksanaan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan.

Semarang, Juli 2026

Gugus Penjaminan Mutu Program Doktor Hukum